

# PENANGGULANGAN KEMISKINAN

&

## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta)



**Ardito Bhinadi**

# PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Ardito Bhinadi

Desain Cover : Ardito Bhinadi  
Tata Letak Isi : Haris Ari Susanto

Cetakan Pertama: Oktober 2017

Hak Cipta 2017, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

Copyright © 2017 by Deepublish Publisher  
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT DEEPUBLISH  
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)  
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)**

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman  
Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581  
Telp/Faks: (0274) 4533427  
Website: [www.deepublish.co.id](http://www.deepublish.co.id)  
[www.penerbitdeepublish.com](http://www.penerbitdeepublish.com)  
E-mail: [cs@deepublish.co.id](mailto:cs@deepublish.co.id)

---

## Katalog Dalam Terbitan (KDT)

---

**BHINADI, Ardito**

Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat/oleh Ardito Bhinadi...  
Ed.1, Cet. 1--Yogyakarta: Deepublish, Oktober 2017.

x, 92 hlm.; Uk:15.5x23 cm

ISBN 978-602-453-441-7

1. Permasalahan dan Kesejahteraan Sosial

I. Judul  
361.1

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan dan Urgensi Penelitian.....	6
1.4. Metode Penelitian .....	7
1.4.1. Metode pengambilan sampel .....	7
1.4.2. Metode pengumpulan data.....	8
1.4.3. Teknik analisis data .....	8
<b>BAB II STUDI LITERATUR.....</b>	<b>9</b>
2.1. Pengertian Kemiskinan dan Indikator Kemiskinan.....	9
2.1.1. Pengertian kemiskinan.....	9
2.1.2. Indikator kemiskinan.....	17
2.2. Penanggulangan Kemiskinan.....	21
2.3. Pemberdayaan Masyarakat .....	23
2.4. Regulasi yang Berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat .....	27
2.5. Tinjauan Kebijakan Internasional, Nasional, dan Daerah .....	32
2.5.1. Kesepakatan internasional .....	32
2.5.2. Kebijakan nasional .....	34
2.5.3. Kebijakan daerah.....	36
2.6. Penelitian Terdahulu .....	36

<b>BAB III PROFIL RUMAH TANGGA MISKIN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA .....</b>	<b>39</b>
3.1. Profil Rumah Tangga Miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	39
3.2. Hasil Survei Rumah Tangga Miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015.....	42
<b>BAB IV EVALUASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA .....</b>	<b>55</b>
4.1. Data Rumah Tangga Miskin .....	55
4.2. Terlampaui Banyak Program dan Kegiatan .....	59
4.3. Kurang Sinergi dalam Perencanaan dan Implementasi Program.....	60
4.4. Eksekusi Program Terlambat .....	61
4.5. Pendampingan Program yang Belum Optimal .....	62
<b>BAB V STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.....</b>	<b>63</b>
5.1. Analisis Lingkungan Strategis Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	63
5.2. Desain Program Pemberdayaan Masyarakat.....	65
5.3. Alur Program Sinergi Pemberdayaan Masyarakat .....	69
5.4. Isu-Isu Strategis dan Program Sinergi Pemberdayaan Masyarakat .....	76
5.5. Kelembagaan Sinergi Pemberdayaan Masyarakat .....	81
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>85</b>
6.1. Kesimpulan .....	85
6.2. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>

# BAB I

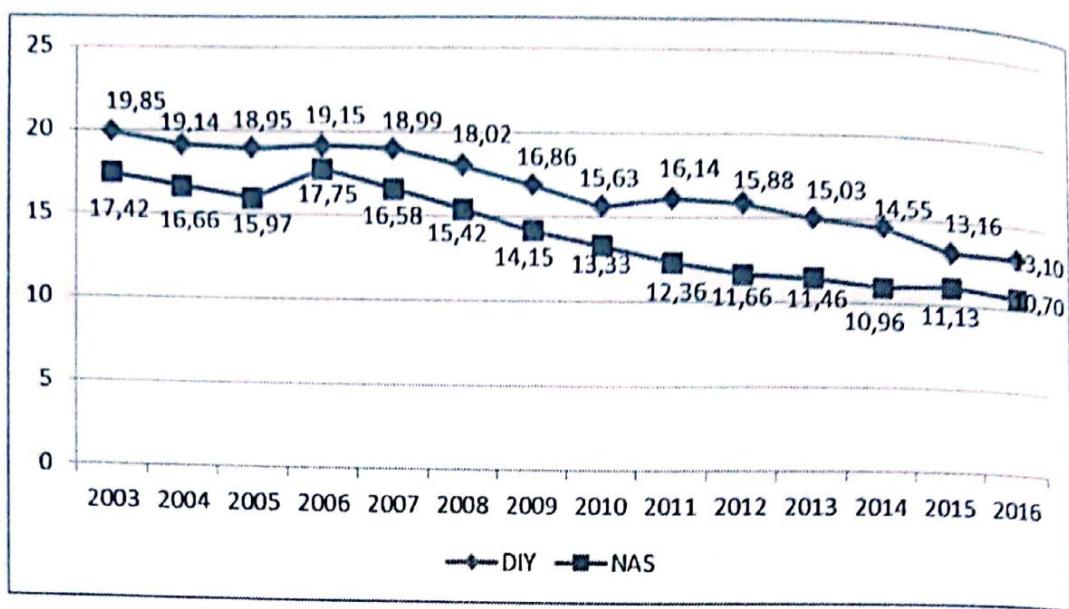
## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

---

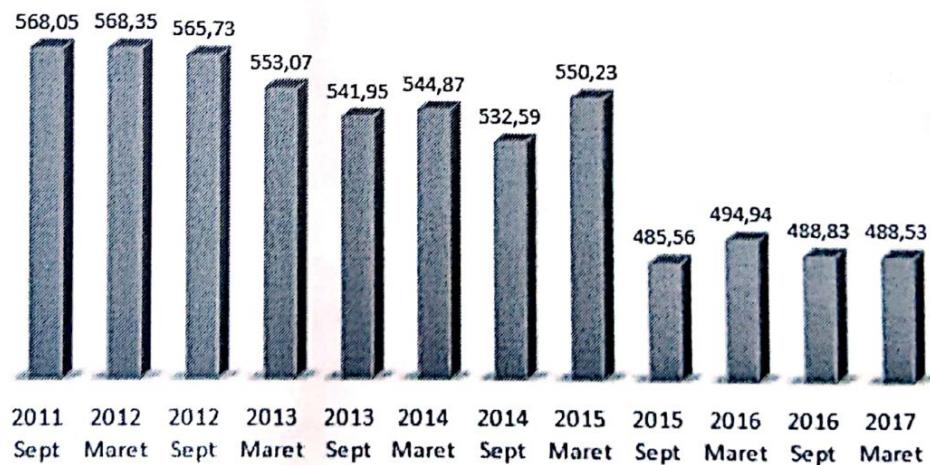
Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu tugas pemerintah daerah yang harus dijalankan sesuai dengan amanah peraturan perundangan. Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat mencakup aspek yang sangat luas, baik aspek ekonomi, sosial, budaya, dan bahkan politik. Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu tantangan besar bagi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah masih relatif tingginya angka kemiskinan DIY dibandingkan angka kemiskinan nasional (lihat Gambar 1.1). Selain masih lebih tinggi daripada angka kemiskinan nasional, penurunan kemiskinan juga relatif lambat. Selama kurun waktu lima tahun tersebut, angka kemiskinan hanya turun sebesar 2,78 persen atau 0,556 persen per tahun. Penurunan ini terbilang rendah karena tidak mencapai 1 (satu) persen per tahun (lihat Gambar 1.2 dan Gambar 1.3).



Sumber: BPS DIY, 2017.

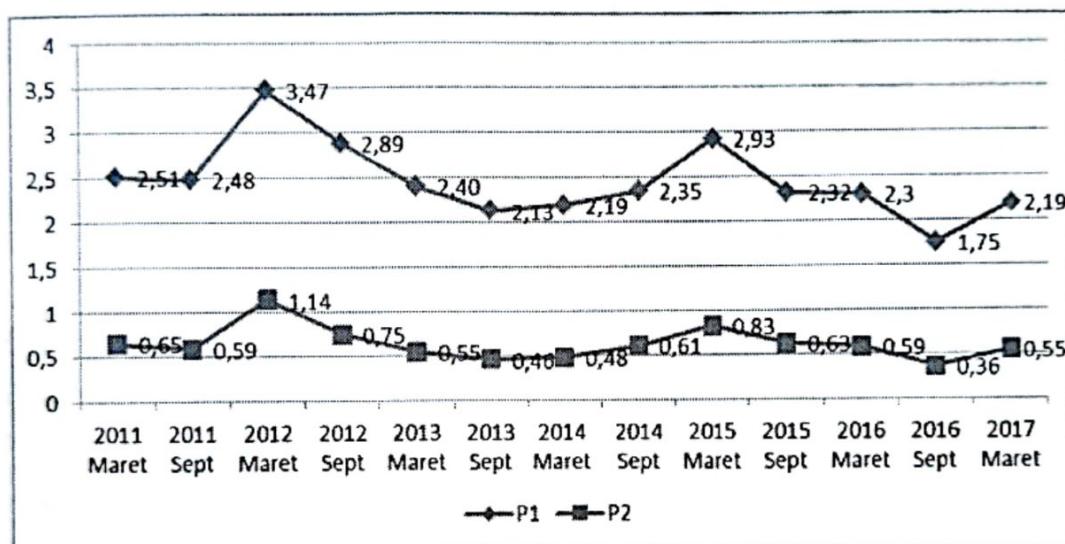
**Gambar 1.1. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Nasional dengan Daerah Istimewa Yogyakarta**



Sumber : BPS DIY, 2017.

**Gambar 1.2. Jumlah Penduduk Miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta**

Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di DIY penurunannya juga relatif lambat. Indeks kedalaman kemiskinan (P<sub>1</sub>) selama lima tahun hanya turun sebesar 1,28; yaitu dari 3,47 pada Maret 2012 menjadi 2,19 pada Maret 2017. Indeks keparahan kemiskinan (P<sub>2</sub>) pada periode yang sama turun sebesar 0,59; yaitu dari 1,14 pada Maret 2012 menjadi 0,55 pada Maret 2017 (lihat Gambar 1.3)<sup>1</sup>.



Sumber: BPS DIY, 2017.

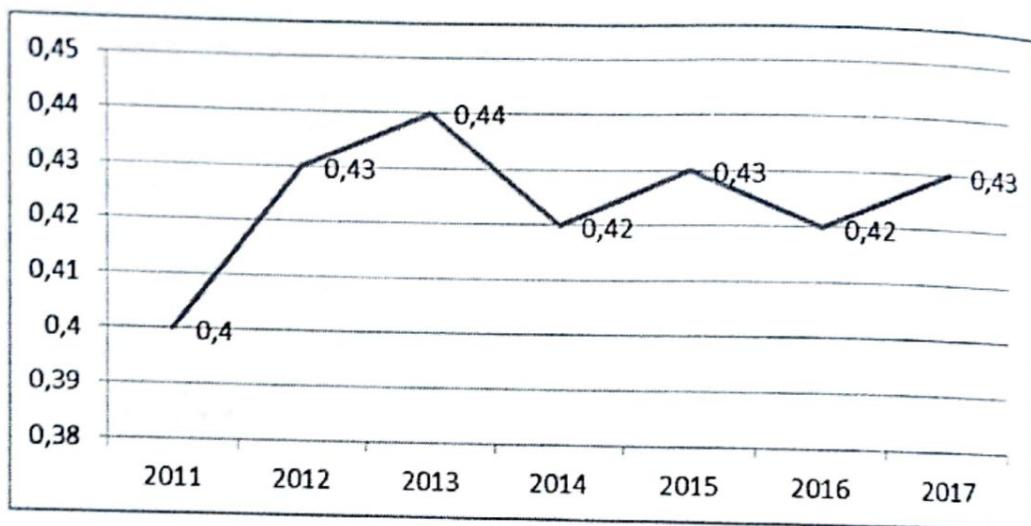
**Gambar 1.3. Trend Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta**

Lambatnya penurunan kemiskinan di DIY selain dibayangi kemungkinan meningkatnya indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan, juga diiringi dengan kecenderungan ketimpangan yang semakin tinggi. Pada tahun 2011, koefisien Gini

<sup>1</sup> Indeks kedalaman kemiskinan (P<sub>1</sub>) merupakan kesenjangan/jarak antara rata-rata standar hidup penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan (P<sub>2</sub>) adalah kesenjangan/sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, dan dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan.

baru mencapai 0,40, namun pada tahun 2017 sudah mencapai 0,43. Meskipun koefisien Gini tahun 2016 ini lebih rendah daripada tahun 2013, namun dilihat dari kecenderungannya (*trend logarithmic*) semakin meningkat (lihat Gambar 1.4).

Melihat potret kemiskinan di atas, penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat sangat tinggi. Diperlukan kajian yang mendalam untuk memecahkan permasalahan-permasalahan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat lainnya.



Sumber: BPS DIY, 2016.

**Gambar 1.4. Trend Gini Ratio di Daerah Istimewa Yogyakarta**

Penanggulangan kemiskinan tidak hanya meliputi satu aspek saja. Kemiskinan muncul karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Demikian pula dengan pemberdayaan masyarakat, bukanlah sebuah proses jangka pendek, namun merupakan proses jangka panjang. Wrihatnolo (2007: 115) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat mengandung dua pengertian yaitu: (1) memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; dan (2) usaha untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. Pihak lain yang dimaksud bukan hanya ditujukan pada

seseorang, namun juga sekelompok orang. Pemberdayaan itu merupakan proses yang sifatnya menyeluruh, yaitu suatu proses aktif antara motivator, fasilitator dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, ketrampilan, pemberian berbagai kemudahan, serta peluang untuk mencapai akses sistem sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diperlukan langkah-langkah untuk penguatan kelembagaan, baik lembaga kemasyarakatan desa, maupun lembaga fungsional, lembaga perekonomian yang ada di desa. Lembaga yang sehat dan kuat menjadi modal utama dalam mengembangkan sumber daya manusia, karena melalui kelembagaan proses pemberdayaan masyarakat akan lebih efektif. Di samping itu dibutuhkan sumber daya manusia yang terampil dan profesional dalam pemberdayaan masyarakat.

Berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dilakukan baik melalui anggaran pusat maupun daerah. Program andalan daerah dalam menanggulangi kemiskinan di DIY adalah Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Program ini telah berjalan selama tiga tahun (2013-2015) namun belum dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.

Diperlukan analisa dan evaluasi mendalam terkait dengan kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola perekonomian makro maupun program-program penanggulangan kemiskinan secara mikro. Evaluasi makroekonomi diperlukan untuk menganalisis apakah pertumbuhan ekonomi yang ada selama ini telah mampu mendorong penurunan kemiskinan atau belum. Evaluasi secara mikro diperlukan untuk menganalisis apakah program-program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan mampu secara efektif mengurangi kemiskinan di DIY.

## **1.2. Perumusan Masalah**

---

Berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh Pemda DIY, namun angka kemiskinan di DIY masih lebih tinggi